



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK**

RENCANA AKSI

2023

GOVINDA

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEUTANAN
WILAYAH MALUKU PAPUA**



KATA PENGANTAR

Rencana Aksi ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua pada Tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlandaskan Rencana kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 maka Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua menyusun Rencana Aksi yang memuat perencanaan dan prognosis per bulan dan per triwulan guna mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan penyusunan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam peningkatan efisien, efektifitas dan produktifitas pada tahun 2023.

Kepala Balai,



Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si

NIP. 19750610 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Aksi Tahun 2023 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua adalah dokumen rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama tercapainya sasaran pada Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara langsung terkait dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2023 maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan program prioritas nasional yang telah ditetapkan.

I.I. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023 adalah memberikan pedoman pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.

Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah untuk mengimplementasikan kegiatan lingkup Unit Pelaksana Teknis sehingga target yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua dapat tercapai.

Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan laporan kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua sebagai salah satu Unit pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

I.II. LANDASAN HUKUM

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada :

1. Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri LHK Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Surat Sekditjen Nomor: S.717/Set.10/PEHKT/Ren.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi TA 2023 Lingkup Ditjen PHLHK.

BAB II
RENCANA AKSI

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 mempunyai sasaran program kegiatan seperti tabel berikut ini :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Operasi Bidang Keamanan	4 Operasi
	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15 Orang
Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	33 Badan Usaha
	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10 Orang
Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Penanganan Perkara	13 Perkara
	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5 Orang

BAB III

PENUTUP

Untuk mencapai sasaran program sesuai Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua berharap pada kontribusi dari Seksi Wilayah Kerja, baik Seksi Wilayah I Papua Barat, Seksi Wilayah II Maluku dan Maluku Utara Serta Seksi Wilayah III Papua. Kontribusi yang besar dari tiap Seksi Wilayah Kerja diharapkan mampu untuk meminimalisir gangguan, ancaman dan pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini disusun dan digunakan sebagai bahan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua serta hasil pelaksanaan kegiatan akan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Dengan disusunnya rencana aksi ini diharapkan menjadi pedoman agar setiap Sumber Daya Manusia yang ada pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua dapat bekerja keras dan bersungguh-sungguh sehingga tujuan program dari Balai, Direktorat Jenderal maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat tercapai.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA AKSI TERHADAP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PPHLHK WILAYAH MALUKU PAPUA

No.	IKK/OUTPUT/KOMPONEN	Triwula I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2023	Satuan
Pengaduan, Pengawasan dan Sangksi Administrasi							
Pengawasan Ketaatan LHK Terhadap Badan Usaha						32	Lembaga
1.	Penanganan Pengaduan Perusahaan	2	6	6	3	17	Verlap
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	2	10	10	3	25	Verlap
	Pengawasan Bidang LHK	1	5	5	4	15	Pengawasan
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
Kasus Tindak Pidana LHK P21						13	Kasus
2.	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	2	4	4	5	15	Kegiatan
	Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	2	4	4	3	13	Penyidikan
Pencegahan dan Pengamanan Hutan							
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan						4	Operasi
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan		2	2	2	2	8	Kegiatan
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan		0	2	0	2	4	Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal						2	Operasi
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal		1	1	2	0	4	Kegiatan
Operasi Pembalakan Liar		0		1		1	Operasi
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar		0	0	1	0	1	Operasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Uraian	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target	Anggaran	Satuan	
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselesainya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sampai Dengan P-21	Kasus Tindak Pidana LHK P21						13	Perkara	
			Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak	Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong	1 Kegiatan	60.600.000		
				Seram	Maluku	Kab. Seram	1 Kegiatan	38.680.000		
				Boven	Papua	Kab. Bovendigoel	1 Kegiatan	56.250.000		
				Arso	Papua	Kab. Keerom	1 Kegiatan	34.360.000		
			Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong	2 Perkara	121.200.000		
				Seram	Maluku	Kab. Seram	1 Perkara	38.680.000		
				Boven	Papua	Kab. Bovendigoel	2 Perkara	121.200.000		
				Arso	Papua	Kab. Keerom	2 Perkara	121.200.000		
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan						2	Operasi	
			Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan	Stenkol	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Operasi	41.880.000		
				Wasior	Papua Barat	Kab. Wondama	1 Operasi	41.880.000		
				Sula	Maluku Utara	Kep. Sula	1 Operasi	41.880.000		
				Senggi	Papua	Kab. Keerom	1 Operasi	41.880.000		
			Operasi Pengamanan	Stenkol	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Operasi	174.600.000		
		Wasior		Papua Barat	Kab. Wondama	1 Operasi	174.600.000			
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal							4	Operasi
			Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil	Kaimana	Papua Barat	Kab. Kaimana	1 Operasi	50.000.000		
				Seram	Maluku	Seram	1 Operasi	43.760.000		
				Bula	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Operasi	43.760.000		
				Samabusa	Papua	Kab. Nabire	1 Operasi	81.240.000		
			Operasi Pembalakan Liar	Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong selatan	1 Operasi	138.000.000		
				Samabusa	Papua	Kab. Nabire	1 Operasi	150.000.000		
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar										
	Tidore	Maluku Utara	Kep. Tidore	1 Operasi	100.000.000					
	Kwamki	Papua	Kab. Mimika	1 Operasi	100.000.000					

5428.QHD	Operasi Pangaasan Sumber Daya Alam		0	230.000.000	292.200.000	994.300.000	502.450.000	1.377.000.000	864.100.000	732.700.000	533.850.000	722.700.000	603.700.000	1.047.000.000	
		RM	0	230.000.000	212.200.000	994.300.000	502.450.000	1.377.000.000	864.100.000	732.700.000	533.850.000	622.700.000	603.700.000	1.047.000.000	
		PNBP	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
5428.QHD.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan		0	0	89.700.000	0	30.150.000	425.700.000	0	0	30.150.000	100.000.000	0	324.300.000	
		RM	0	0	89.700.000	0	30.150.000	425.700.000	0	0	30.150.000	0	0	324.300.000	
		PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
5428.QHD.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal		0	230.000.000	202.500.000	994.300.000	472.300.000	951.300.000	864.100.000	732.700.000	503.700.000	622.700.000	603.700.000	722.700.000	
		RM	0	230.000.000	122.500.000	994.300.000	472.300.000	951.300.000	864.100.000	732.700.000	503.700.000	622.700.000	603.700.000	722.700.000	
		PNBP	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
'029.10.WA	Program Dukungan Manajemen		651.844.770	1.241.695.495	1.435.842.832	2.205.464.582	1.730.602.777	1.761.363.717	2.312.765.960	1.605.430.321	1.887.646.610	2.031.112.610	1.903.203.326	1.529.206.000	
		RM	651.844.770	1.241.695.495	1.435.842.832	2.205.464.582	1.730.602.777	1.761.363.717	2.312.765.960	1.605.430.321	1.887.646.610	2.031.112.610	1.903.203.326	1.529.206.000	
		PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		651.844.770	1.241.695.495	1.435.842.832	2.205.464.582	1.730.602.777	1.761.363.717	2.312.765.960	1.605.430.321	1.887.646.610	2.031.112.610	1.903.203.326	1.529.206.000	
		RM	651.844.770	1.241.695.495	1.435.842.832	2.205.464.582	1.730.602.777	1.761.363.717	2.312.765.960	1.605.430.321	1.887.646.610	2.031.112.610	1.903.203.326	1.529.206.000	
		PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5427.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		0	0	44.000.000	30.250.000	101.800.000	169.250.000	111.700.000	48.800.000	173.000.000	161.950.000	84.000.000	25.250.000	
		RM	0	0	44.000.000	30.250.000	101.800.000	169.250.000	111.700.000	48.800.000	173.000.000	161.950.000	84.000.000	25.250.000	
		PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5427.EBA.962	Layanan Umum		0	0	44.000.000	30.250.000	101.800.000	169.250.000	111.700.000	48.800.000	173.000.000	161.950.000	84.000.000	25.250.000	
		RM	0	0	44.000.000	30.250.000	101.800.000	169.250.000	111.700.000	48.800.000	173.000.000	161.950.000	84.000.000	25.250.000	
		PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5427.EBA.994	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)		651.844.770	1.241.695.495	1.391.842.832	2.175.214.582	1.628.802.777	1.592.113.717	2.201.065.960	1.556.630.321	1.714.646.610	1.869.162.610	1.819.203.326	1.503.956.000	
		RM	651.844.770	1.241.695.495	1.391.842.832	2.175.214.582	1.628.802.777	1.592.113.717	2.201.065.960	1.556.630.321	1.714.646.610	1.869.162.610	1.819.203.326	1.503.956.000	
		PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH															
	RM	651.844.770	1.551.545.495	2.487.642.832	4.228.784.582	3.057.702.777	3.819.273.717	3.893.983.960	2.716.482.321	2.930.246.610	3.252.829.610	2.629.720.326	2.939.429.000		
	PNBP	0	0	421.760.000	180.000.000	230.925.000	419.365.000	146.055.000	333.315.000	246.695.000	545.535.000	223.050.000	84.903.000		
	TOTAL	651.844.770	1.551.545.495	2.909.402.832	4.408.784.582	3.288.627.777	4.238.638.717	4.040.038.960	3.049.797.321	3.176.941.610	3.798.364.610	2.852.770.326	3.024.332.000		
PER TRIWULAN															
	TW I	RM		4.691.033.097		TW II	RM	11.105.761.076		TW III	RM	9.540.712.891	TW IV	RM	8.821.978.936
		PNBP		421.760.000			PNBP	830.290.000			PNBP	726.065.000			PNBP
	TOTAL		5.112.793.097			TOTAL	11.936.051.076			TOTAL	10.266.777.891		TOTAL	9.675.466.936	

34.159.486.000

2.831.603.000

36.991.089.000